

## RP 411 JUTA DARI BPKH RS UNS Dapat Bantuan APD

**SOLO (KR)** - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan bantuan kemaslahatan kepada Rumah Sakit (RS) Universitas Sebelas Maret (UNS) senilai Rp 411 juta berupa alat pelindung diri (APD), melalui mitra kemaslahatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Serah-terima bantuan dilakukan anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) A Iskandar Zulkarnain diterima langsung Rektorat UNS Prof Dr Jamal Wiwoho di ruang Rektorat Kampus Kentingan, Jumat (4/9).

Menurut A Iskandar Zulkarnain, BPKH mengapresiasi tenaga medis RS UNS yang menjadi garda terdepan dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Ia mengajak semua pihak bekerja sama memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. "Bantuan APD ini berasal dari nilai manfaat yang didapat dari hasil pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014," jelasnya. (Hwa)

## SEBELUM MENDAFTAR DI KPU Cabup-Cawabup Wajib Swab

**SRAGEN (KR)** - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen memutuskan kandidat calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) harus melampirkan hasil tes swab saat mendaftar di KPU. Pendaftaran peserta Pilbup Sragen akan dibuka mulai 4 September 2020 hingga 6 September 2020. "Salah satu syarat pendaftaran paslon adalah melampirkan hasil tes swab," ungkap Ketua KPU Sragen, Minarso.

Menurutnya, hal itu dimaksudkan agar dalam proses pemeriksaan kesehatan di rumah sakit benar-benar tidak ada bakal calon yang terpapar Covid-19. Untuk itu, KPU juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pengurus parpol, terutama terkait persyaratan dan tata cara pendaftaran paslon oleh parpol pengusung ke KPU.

Minarso juga mengimbau paslon dan parpol tidak membawa massa saat mendaftar di KPU. Pihaknya tidak membatasi jumlah, tapi minta hanya yang berkepentingan saja yang hadir. Hal itu dikarenakan situasi masih masa pandemi Covid-19. (Sam)

## PANDEMI COVID-19 DI PATI Dampak Sosial Lebih Tinggi

**PATI (KR)** - Pemerintah harus serius menangani pandemi Covid-19, karena dampaknya tidak lagi masalah kesehatan, tetapi sudah merambah ke dimensi sosial kemasyarakatan. "Presiden Joko Widodo diminta harus cepat menggerakkan semua lembaga negara untuk menyadarkan masyarakat agar memahami dampak Covid19," kata Wakil Ketua DPP Partai Golongan Karya, H Firman Subagyo SE, Jumat (4/9).

Menurutnya, dampak pandemi Covid19 sudah merambah ke multiplayer effect, di antaranya kesehatan, ekonomi dan sosial. "Contoh kasus masalah, yakni munculnya gugatan cerai," tutur Firman. (Cuk)

## MENGAWALI SANKSI BERSIHKAN SUNGAI

# DKK Solo Intensifkan Kampanye GPM

**SOLO (KR)** - Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo mengintensifkan kampanye Gerakan Pakai Masker (GPM), menyusul rencana penerapan sanksi membersihkan sungai terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada pertengahan bulan ini. Kampanye GPM yang diluncurkan sepanjang bulan September ini, menyasar pada masyarakat yang kebetulan berada di tem[at umum, seperti pasar tradisional, pasar modern, pengguna jalan raya, dan sebagainya.

"Tingkat kedisiplinan masyarakat mengenakan masker sebenarnya cukup baik. Namun masih perlu pemantapan. Paling tidak, kampanye ini lebih diarahkan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pola penularan virus korona (Covid-19), hingga mengenakan masker menjadi gaya hidup setiap kali beraktivitas di luar rumah," ungkap Kepala DKK, Siti Wahyuningsih saat mengawali GPM di Pasar Gedhe, Jumat (4/9).

Penularan covid-19, tambah Wahyuningsih, pada umumnya melalui *droplet* atau cairan tubuh yang keluar dari hidung atau mulut. Saat seseorang yang telah terinfeksi Covid-19 bersin, batuk atau bahkan berbicara, *dorplet* akan terhirup orang yang kebetulan berada di dekatnya, atau menempel pada benda hingga terjadi proses

penularan. Karenanya, pola pencegahan penularan dapat dilakukan dengan mengenakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir, serta menjaga jarak.

Dalam beberapa hari terakhir, tambahnya, kasus terkonfirmasi positif Covid-19, cenderung naik. Sebagian di antaranya diketahui melalui uji swab mandiri. Pada Kamis (3/9), misalnya, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah 19 orang dibanding satu hari sebelumnya, hingga total kumulatif mencapai 440 orang. "Dari jumlah tersebut, 37 orang masih menjalani perawatan, 52 orang melakukan isolasi mandiri, 332 orang dinyatakan sembuh, dan 19 orang meninggal dunia," jelas Wahyuningsih.

Terkait dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan sebagai bagian

memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo akan lebih mengedepankan sanksi sosial. "Ekonomi masyarakat sudah susah, tidak perlu dibebani lagi dengan denda uang, kendati melakukan pelanggaran. Sedangkan sanksi sosial yang bakal diterapkan mulai pertengahan September ini berupa kerja membersihkan sungai," tandasnya.

Dia menilai, sanksi sosial membersihkan sungai akan lebih efektif dibanding denda uang. Kendati begitu, ia tidak ingin satu orangpun terkena sanksi membersihkan sungai, karena semua warga disiplin mengenakan masker saat berada di luar rumah. Termasuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak saat beraktivitas dengan orang lain.

Kepala Bagian Humas dan Protokol (Humprot), Wahyu Kristina menyebutkan, kampanye GPM yang dimulai pada Jumat (4/9) ini akan berlangsung hingga 25 September mendatang. Sasaran kampanye di antaranya kawasan Pasar Gedhe, Pasar Legi, Pasar Singosaren, Pasar Klewer, Alun-alun Utara, Pusat Grosir Solo, Beteng Trade Centre, serta sejumlah simpang empat jalan raya. (Hut)

## MENJELANG PILKADA GROBOGAN

# Bupati Lantik 94 Pejabat Eselon

**GROBOGAN (KR)** - Menjelang Pilkada Grobogan 2020 ini, Bupati Hj Sri Sumarni SH MM melantik dan mengambil sumpah 94 pejabat di lingkungan Pemkab setempat, Kamis (3/9). Sembilan orang di antaranya pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau level eselon II yang sebelumnya mengikuti proses seleksi terbuka. Pejabat lainnya adalah level eselon III, IV dan Direktur Utama serta Direktur Pemasaran pada Perusda PT BPR BKK Purwodadi.

Sembilan pejabat hasil terbuka adalah Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Drs Teguh Harjokusumo R MSi yang menduduki jabatan baru sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kabag Umum Setda Supriyanto SSos MM menjadi Kepala Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Daerah, Kabag Perekonomian Pradana Setyawan SPT MP menjadi Kepala Diperindag, Camat Geyer Drs Aries Ponco Wibowo menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabag Administrasi Pembangunan Drs Siswanto MM menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Camat Grobogan Nur Nawanta AP menjadi Kepala Satpol PP, Sekretaris Disporabudpar Edy Santoso SSos MM menjadi Kepala Dinsos, Kabag Perencanaan dan Rekam Medik RSUD Purwodadi dr Edi Mulyanto SpS MKes MSi menjadi Direktur RSUD Purwodadi, dan Camat Gugub Achmad Basuki Mulyono SSos MM menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (Tas)

## PELAKU UMKM DI BANYUMAS

# Terima Bantuan Pemerintah

**BANYUMAS (KR)** - Sebanyak 2.149 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas menerima bantuan pemerintah bagi usaha mikro (BPUM) Rp 2,4 juta tahap awal. "Dari sekitar 7.000 pelaku UMKM Banyumas yang sudah didaftarkan untuk menerima BPUM ke Kementerian Koperasi dan UKM pada tahap awal, sebanyak 2.149 sudah menerima BPUM lewat bank yang ditunjuk," jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM (Dinarkop dan UKM) Kabupaten Banyumas Joko Wiyono, Jumat (4/9).

Joko Wiyono menambahkan di Banyumas saat ini ada 53.778 pelaku UMKM yang terdata dalam BPUM. Kendati telah

cair sebagian, pendaftaran bagi pelaku usaha mikro guna mendapatkan bantuan ini masih terbuka. Bantuan pemerintah kepada pelaku usaha kecil akan dibagi dalam 4-5 tahap. Tahap pertama 12 Agustus ada sekitar 10.158 pelaku UMKM, tahap kedua 19 Agustus ada 17.457 UMKM, tahap ketiga 28 Agustus ada 9.687 UMKM, dan tahap keempat 20 September ada 16.485 UMKM. "Tootal ada 53.778 UMKM yang terdata di Banyumas," ungkapnya.

Menurutnya, syarat mendapatkan bantuan presiden itu cukup mudah, yaitu para pelaku UMKM, mempunyai NIK, ada produknya, ada alamatnya, nomor hp, dan rekening bank. (Dri)

# HUKUM

## DIDUGA KORUPSI DANA DESA

# Kades dan Sekdes Ditangkap

**PURWOREJO (KR)** - Diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa hingga Rp 1.039.859.456, Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) Wonosari Kemiri Purworejo harus berurusan dengan penegak hukum.

"Tindak pidana korupsi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun anggaran 2016 hingga 2018," jelas Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Agil Widiyans Sampurna SIK MH, Jumat (4/9).

Dalam kasus ini penyidik menyita barang bukti di antaranya dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa (rekening desa, APBDes, Perdes, SPJ dan lainnya), kwitansi pembayaran material dan lainnya.

Sedang kedua tersangka yakni Kades Wonosari SD (44) dan Sekdesnya Utg (49). Modus tindak pidana korupsi yang dilakukan, berawal dari pengelolaan dana desa yang tidak dilakukan kepala urusan (Kaur) keuangan tapi setelah seluruh dana ditarik dari Rekening Kas Desa oleh SD dan Utg, dana itu diserahkan dan dikelola oleh Utg.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan baik pembangunan fisik maupun non-fisik tidak dapat dipertanggungjawabkan. "Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dibuat tersangka Utg dan tidak sesuai realisasi, bahkan ada anggaran kegiatan fisik yang sama sekali tidak dilakukan namun tetap ada di RAB," jelas Agil. (Nar)

## KORBAN MENGAKU SUDAH LUNASI PEMBELIAN TANAH Terdakwa 'Kekeh' Masih Kurang

**YOGYA (KR)** - Meski terdakwa pasutri pengusaha Ir Agus Artadi (58) dan Yenny Indarto (58) bersikukuh menyatakan belum menerima kekurangan pembayaran penjualan tanah/rumah miliknya di Jalan Magelang Yogya, tapi saksi korban (pembeli) Gemawan juga tetap menyatakan telah membayar lunas dan melakukan proses balik nama. "Hingga saat ini saya tidak bisa menempati atau menguasai tanah dan rumah tersebut karena kedua terdakwa tidak mau mengosongkan rumah yang telah mereka jual," ucap Gemawan saat menjadi saksi di PN Yogya, Kamis (3/9).

Gemawan dihadirkan Jaksa Edi Budianto SH bersama 3 saksi lainnya yakni Anton, Indang S dan Kadri. "Pembayaran di bulan September 2018 melalui bank karena sertifikat diagunkan, dibayarkan Rp 3 miliar pada terdakwa untuk menebus sertifikat, kemudian balik nama diagunkan lagi Rp 2 miliar untuk pembayaran selanjutnya, hingga total terdakwa menerima Rp 5 miliar melalui bank," ucap Gemawan saat dicecar pertanyaan majelis hakim yang diketuai Bandung Suhermoyo SH.

Sedang kekurangan Rp 1,5 miliar telah dibayarkan dengan perhitungan Rp 250 juta untuk pajak jual beli dan berupa alat-alat pertanian senilai Rp 1,25 miliar yang diserahkan pada saksi Anton atas pengetahuan kedua terdakwa untuk melunasi utang terdakwa pada Anton disertai dokumen penyerahan yang disusun dan dike-

etahui Julia (istri Gemawan) dan ditandatangani terdakwa Agus Artadi dan saksi Anton.

Sementara saksi Anton menyebutkan kedua terdakwa punya utang kepadanya Rp 1,3 miliar, sehingga untuk melunasinya terdakwa bermaksud menjual tanah/rumahnya. "Saya mendapat kuasa menjual rumah saya dan saya tawarkan pada Julia dan Gemawan yang akhirnya melakukan jual beli. Saya tidak mencari untung, hanya membantu terdakwa agar bisa membayar utangnya," ujarnya.

Namun keterangan saksi-saksi tersebut dibantah terdakwa Agus Artadi dan Yenny Indarto yang menyatakan telah melunasi utangnya dengan Anton dan sudah menarik kembali kuasa jual beli. "Saya tidak pernah tanda tangan dan pemalsuan dokumen sudah kita laporkan ke Polda dan sudah sampai ke penyidikan," ujarnya.

Penasihat hukum terdakwa Oncan Poerba SH didampingi Willyam H Saragih SH dan FX Yoga Nugrahanto SH menegaskan kedua terdakwa tidak pernah memaksakan diri masuk rumah tapi memang dari dulu menempati rumah itu, tetap bertahan karena belum ada pelunasan. "Apakah terdakwa merusak atau masuk tanpa izin? Tidak. Jeratan pidana Pasal 167 KUHP memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa izin tidak bisa dipaksakan. Kalau masih berkaitan masalah jual beli kekurangan pembayaran itu masuk ranah perdata," tegas Oncan. (R-4)

## 3 ORANG SELAMAT, 1 HILANG

# 4 Wisatawan Terseret Ombak Parangtritis

**BANTUL (KR)** - Kecelakaan laut kembali terjadi di pantai Selatan Bantul, Jumat (4/9). Kali ini musibah tersebut terjadi di Pantai Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Empat orang terseret ombak, tiga di antaranya berhasil diselamatkan dan 1 lainnya masih dalam pencarian yakni, Faran Diva Bahtyararta (18) asal Kanigoro Madiun.

Sedang tiga orang berhasil selamat yakni Afrian Azhary (18), Risky Pratama Putra (21) serta Ervian Risky Dwitama Putra (16) semua asal Madiun.

Komandan SAR Korwil 3 Parangtritis, Ali Sutanta, mengungkapkan pagi itu rombongan terdiri 7 orang sampai di Parangtritis. Kemudian empat orang mandi di lokasi palung. "Mreka terseret ombak, kemudian

anggota SAR Parangtritis Hery Kiswanto berhasil menyelamatkan tiga orang itu. Tapi satu orang hingga kini masih dalam pencarian," ujar Ali.

Dirpolairud Polda DIY, Kombes Rudi Rifani SIK didampingi Kapolres Bantul AKBP Wachyu Tri Budi Sulistiyono SIK, mengungkapkan rombongan korban terdiri tujuh orang. Lima lelaki dan dua orang pe-

rempuan. Sebelumnya rombongan asal Madiun ini sampai Yogyakarta Kamis malam dan langsung berkunjung ke Malioboro.

Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju Pantai Parangtritis. Karena masih gelap, Jumat (4/8) pagi itu mereka tidak langsung

turun ke pantai, tapi berada di dalam mobil. "Kemudian sekitar pukul 06.00, 4 orang mandi di pantai dan terseret ombak. Tiga orang berhasil diselamatkan tim SAR, 1 orang sampai saat ini masih dalam pencarian," ujarnya. (Roy)



KR-Sukro Riyadi

Pencarian dilakukan personel SAR dan TNI Angkatan Laut di sepanjang Pantai Parangtritis.

## DENGAN PETUNJUK SIDIK JARI

# Kasus Pembunuhan 5 Tahun Lalu Terungkap

**BANTUL (KR)** - Tim Opsnal Polda DIY bersama jajaran Satreskrim Polres Bantul dan Polsek Banguntapan berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap korban Witarto (36) penjaga malam Kampus Akademi Komunikasi Radya Binatama (AKRB) Banguntapan yang terjadi pada 4 November 2015. Tim juga telah meringkus pelaku berinisial Yul (46) warga Gendeng Baciro Yogya, yang sekarang diamankan di Mapolres Bantul bersama barang bukti.

Direskrimum Polda DIY, Kombes Burkan Rudi Satria SIK didampingi Kabid Humas Polda DIY Kombes Yulianto SIK dan Kapolres Bantul AKBP Wachyu Tri Budi Sulistiyono SIK, Jumat (4/8), menyatakan kasus ini terungkap berawal dari penemuan sidik jari pelaku

di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan dipimpin Kompol Wayan, ternyata sidik jari tersebut ada kecocokan dengan sidik jari yang ada di KTP pelaku.

Dengan petunjuk sidik jari tersebut, petugas langsung menangkap pelaku, Rabu (2/9). Saat ditangkap, pelaku tak bisa berkelit ke-

mudian digiring ke Polres Bantul.

Di depan petugas, Yul mengakui perbuatannya dan mengkisahkan ketika beraksi di Kampus AKRB pada November 2015. Diawali pelaku jalan kaki dari rumahnya yang berjarak 2 Km. Sampai di Kampus AKRB, pelaku melompat pagar kemudian masuk melalui dapur dengan merusak

pintu. Pelaku sempat menutup lensa CCTV.

Ketika sedang beraksi pelaku kepergok korban atau penjaga malam di Kampus AKRB. Mengetahui hal itu, pelaku langsung memukul korban dengan linggis sebanyak 3 kali pukulan hingga tewas. Setelah itu, pelaku memasuki ruang bendahara, tapi tidak mendapati barang maupun uang. Kemudian pelaku meninggalkan kampus tanpa membawa hasil.

Pelaku juga mengaku pernah melakukan pencurian di SMA UII Banguntapan pada 2012 sempat bawa kabur uang Rp 23 juta, tahun 2017 kembali membolol SMA UII dapat membawa kabur uang Rp 50 juta. Sasaran lain yang pernah disatroni SMA Depok Sleman. Pelaku bisa diancam hukuman selama 20 tahun. (Jdm)



KR-Istimewa

Pelaku pembunuhan diamankan di Mapolres Bantul.